

Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH): meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, dan Kinerja Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Pangung

Syarip Hidayat

Program Studi Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IIB Darmajaya

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Kedaton, Bandar Lampung

e-mail: h.syarip88@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan Purwoasri ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.

Kata kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau nama dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu Negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 220 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan Tiongkok dan India. Kerajaan kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.

Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah namun hal ini tidak menjadikan Indonesia menjadi Negara yang maju sampai saat ini kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi Indonesia.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan difahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :

- a. Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, pangan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini difahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa factor diantaranya nya.
- d. Pengangguran, semakin banyak pengangguran semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada disekitar, karna pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya keterampilan ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik.
- f. Bencana alam, banjir dan tanah longsor serta bencana alam lainnya menyebabkan gagal panen nyapara petani sehingga tidak ada bahan makanan untuk di konsumsi dan dijual kepada para penadah atau koperasi.

Cara mengurangi kemiskinan pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lainnya harus memiliki langkah yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. hal inilah yang akhirnya menjadi landasan Kementerian Sosial Republik Indonesia melahirkan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH berada dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dan TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. Program Keluarga Harapan merupakan lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Team Tenaga ahli PKH dan Konsultan World Bank serta diawasi oleh Undang – Undang yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan non tunai kepada keluarga yang berhak menerima bantuan yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui dan memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta Program Keluarga Harapan akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Program Keluarga Harapan Sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara - negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang diterjemahkan menjadu Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini “bukan” dimaksud sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Kelaparan seringkali terjadi bukan karena makanan di daerah tersebut tidak mencukupi tetapi orang miskin tidak diperbolehkan dan tidak mempunyai hak untuk memakan makanan yang ada disana (Suharto, 2008 : 17), kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia, Untuk itu penulis sangat tertarik dalam menulis program tersebut baik sasaran dan penerapan sistem PKH ini, hal ini menjadi pembicaraan yang lagi hangat dikalangan masyarakat umumnya yang memperoleh bantuan dalam program PKH.

Namun dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan masih belum tersosialisasi kepada masyarakat miskin, selain itu masyarakat yang menerima bantuan PKH tetapi belum tersalurkan oleh bantuan tersebut. Hal ini terlihat pada saat pra survey pada tanggal 13 November 2016 di Kecamatan Pulau Panggung hal ini membuktikan masih banyaknya masyarakat di Kecamatan Pulaupanggung yang belum mengetahui program tersebut. Salah satu faktor penyebab Program Keluarga Harapan ini belum terealisasi secara optimal menurut penulis dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat Pulaupanggung yang belum menerima sosialisasi program tersebut. Dan masih kurangnya kemampuan mereka dalam memanager keuangan yang dibantu atau diberikan oleh pemerintah untuk mereka dan keluarganya. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan pembinaan sumber daya manusia terhadap Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertempat di Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus.

Masalah kemiskinan bisa dikatakan sebagai masalah yang tiada henti mewarnai kehidupan bangsa Indonesia di masa kemerdekaan, bahkan pada masa penjajahan. Kesenambungan masalah kemiskinan dari masa ke masa ditandai oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada periode pemerintahan yang satu ke periode pemerintahan yang lain, dari presiden satu ke presiden yang lain. Salah satu periode pemerintahan periode paling panjang dalam sejarah Indonesia adalah pemerintahan Orde Baru yang menjalankan strategi pembangunan berdasarkan trilogy: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pada periode pemerintah Orde Baru inilah dinamika penanggulangan kemiskinan sangat beragam. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Partisipasi adalah suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa "pembangunan", termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya [1].

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya [2]. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.(Dr. Arifin Sitio). Secara umum, partisipasi dapat di artikan sebagai keterlibatan diri

seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu.

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat namun kemudian Program Keluarga Harapan ini dapat dilaksanakan berkelanjutan padan pemerintahan Bapak Jokowi beliau mencanangkan Program ini tidak akan dihilangkan karena program PKH ini dapat sangat membantu untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Republik Indonesia.

Pada tahun 2007 lalu dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah sasaran program sebanyak 500.000 RTSM. Ketujuh provinsi tersebut adalah: Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Tahap uji coba ini berhasil, kemudian PKH akan dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2020 masuknya Program Keluarga Harapan ini sendiri di Lampung pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan komitmen pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), mengingat sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode tersebut, target peserta secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh KPM dengan anak usia pendidikan dasar hingga atas dan ibu hamil / nifas. Kemudian pihak-pihak terkait pada program ini. PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten / Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah:

UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan

Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak - pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten / kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung.

Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan Bappeda di tiap kabupaten kemudian kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

Tujuan utama dari Program PKH di Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM / sekarang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM dari tingkat Sekolah Dasar hingga Ke Sekolah Menengah Atas / sederajat.
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari KPM, (Peraturan Kementerian Sosial No.31/KEP/MENKO-KESRA/IX/2007).
4. Pemberdayaan keluarga khususnya ibu rumah tangga dan anak – anak

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-18 tahun dan / atau ibu hamil / nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante / bibi, atau kakak perempuan atau anak perempuan tertua di keluarga terpilih untuk dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu / wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Adapun Komponen Bantuan dan Jangka Waktu Kepesertaan PKH Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Skenario Komponen Bantuan per KPM per tahun pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Komponen Bantuan PKH TA 2014 dan 2015

No	Komponen Bantuan	Bantuan Per KPM 2015 (Per tahun)	Bantuan Per KPM 2016 (Per tahun)
1	Bantuan Tetap	Rp. 300.000	Rp. 500.000
2	Bantuan kesehatan untuk Ibu Hamil / Nifas Menyusui Balita / Anak Usia Pra Sekolah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000
3	Bantuan Pendidikan :		
	Anak Usia SD	Rp. 500.000	Rp. 450.000
	Anak Usia SMP	Rp. 1.000.000	Rp. 750.000
	Anak Usia SMA	-	Rp. 1.000.000
4	Bantuan Minimum	Rp. 800.000	Rp. 950.000
5	Bantuan Maximum	Rp. 2.800.000	Rp. 3.900.000

Berdasarkan tabel 1 di atas, Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi KPM dengan anak dibawah 6 tahun dan / atau ibu hamil / nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak sedangkan besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan KPM per tahun. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

- Menyekolahkan anak 7-18 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 12 tahun wajib belajar.
- Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak, dan untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori dengan jenis penelitian survei untuk mengetahui partisipasi masyarakat kecamatan Pulaupanggung terhadap Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat [3]. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif, yaitu metode analisa yang dilakuka dengan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan [4]. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi atau analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Penelitian merupakan kegiatan untuk menguji hipotesis yakni menguji kecocokan antara teori dan fakta.

Kriteria Informan sebagai berikut:

- a. Pegawai atau Pejabat yang telah menjabat dibidangnya minimal 2 tahun
- b. Keluarga Penerima Manfaat minimal sudah 4 kali menerima bantuan

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan melalui kuesioner, wawancara secara langsung, maka diperoleh data responden dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan. Dari petikan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat dipahami, bahwa bantuan PKH yang berbentuk bantuan tunai berupa uang sangatlah dibutuhkan oleh rumah tangga sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari walaupun itu tidak mencukupi, tapi dapat membantu perekonomian mereka.

Rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga sangat miskin membuat peserta PKH di kecamatan pulaupanggung faham tentang pentingnya pendidikan bagi anak dan sering mengabaikan pendidikan anak demi kebutuhan sehari-hari. Peran pendamping PKH dan petugas fasilitas pendidikan atau pihak sekolah sangat dibutuhkan oleh peserta PKH, dengan selalu memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan, serta selalu memberikan motivasi kepada rumah tangga sangat miskin tentang pentingnya pendidikan untuk merubah kehidupan sosial di masa depan, dengan memberikan pendidikan tertinggi kepada anak akan memutus rantai kemiskinan di dalam keluarga sangat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengatur atau membuat ketentuan- ketentuan secara eksplisit tentang penggunaan dana bantuan yang diterima oleh peserta PKH. Dana bantuan dapat dipergunakan seluas-luasnya oleh Pengurus Rumah Tangga (PRT) yaitu ibu untuk keperluan apapun. Baik itu menyangkut biaya pendidikan, kesehatan, ataupun untuk keperluan lainnya. Adapun hal yang diatur yaitu tentang pelaksanaan komitmen terhadap kategori manfaat yang diterimanya.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilihat dari proses dalam pelaksanaan PKH menunjukkan belum berjalan secara maksimal. Walaupun pelaksanaan PKH khususnya di bidang pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada program. Serta pada awal pelaksanaannya kegiatan PKH ada beberapa proses yang belum dilaksanakan seperti pada tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2009 yaitu belum didistribusikannya form verifikasi pendidikan ke fasilitas pendidikan sehingga pada saat itu

- sanksi belum dijalankan bagi peserta PKH yang tidak menjalankan kewajibannya.
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari dampaknya yaitu pengaruhnya terhadap kesejahteraan, bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan peserta PKH, karena bantuan tunai yang diterima RTSM dapat membantu mengurangi beban perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti uang sekolah, buku sekolah, seragam sekolah serta alat tulis dan sebagainya walaupun belum menghasilkan yang maksimal. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan hasil yang positif untuk peserta PKH, hasil yang ditimbulkan adalah peserta PKH sangat puas dengan PKH dan kegiatannya memberikan hal yang positif terutama untuk bidang pendidikan dapat mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah, mengurangi tingkat pekerja anak, anak jalanan, serta mengurangi tingkat anak putus sekolah, sudah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum mencapai hasil yang maksimal. Dengan turut serta berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban/kegiatan PKH. PKH juga memberikan dampak keuntungan bagi RTSM karena dengan adanya dana bantuan tunai PKH yang dapat membantu beban biaya mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 3. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH adalah masih adanya peserta PKH yang kurang aktif dalam menjalankan program seperti untuk hadir dalam pertemuan kelompok dan melaksanakan kewajiban di bidang pendidikan dan masih terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi dan koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan PKH.
 4. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari dampak dan hasilnya terhadap keberlanjutan program. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) layak dan dapat menjadi program yang berkelanjutan karena dari segi dampaknya terhadap kesejahteraan RTSM. PKH sangat bermanfaat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), terutama pada bidang pendidikan dapat mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah, mengurangi tingkat pekerja anak, anak jalanan, serta mengurangi tingkat anak putus sekolah, karena bantuan yang diberikan kepada RTSM dapat membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka khususnya untuk kebutuhan pokok, serta memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti biaya uang sekolah, seragam sekolah serta perlengkapan alat tulis sekolah, walaupun belum mencukupi tapi dapat membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM.

Adapun saran untuk perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya adalah:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas sektoral sehingga dalam melaksanakan kegiatan PKH, hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH seperti: pendamping PKH, peserta/penerima manfaat PKH, petugas pendidikan, UPPKH Kecamatan, dan UPPKH Kab/Kota terbangun hubungan dan kerjasama yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga tercipta komunikasi dan koordinasi yang baik pula demi kelancaran dan keberlanjutan program di masa yang akan datang.
2. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di bidang pendidikan yaitu meningkatnya status pendidikan anak usia sekolah, mengurangi tingkat pekerja anak, anak jalanan, serta mengurangi tingkat anak putus sekolah, maka diperlukan kerja keras Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan. Perlu dilakukan sosialisasi, motivasi dan pengetahuan serta informasi yang terus menerus tanpa bosan tentang pentingnya pendidikan, sehingga terbangun kesadaran dan perubahan perilaku dari peserta/penerima manfaat PKH tentang pendidikan.
3. Agar Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program yang berkelanjutan karena dilihat dari dampak yang dihasilkan PKH sangat bermanfaat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), karena bantuan yang diberikan kepada RTSM dapat membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka khususnya untuk kebutuhan pokok, serta memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti biaya uang sekolah, seragam sekolah serta perlengkapan alat tulis sekolah, walaupun belum mencukupi tapi dapat membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM.

Daftar Pustaka

- [1] Sajogyo dan Pudjiwati, Sajogyo. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2002.
- [2] Sastropoetro, S. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni. 1995.
- [3] Hadari, Nawawi dan Martini Hadawi. Administrasi Personel untuk Produktivitas Kerja. Jakarta: Haji Masagung. 1990.
- [4] Sugiyono. Metode Penelitian nPendidika Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D : ALFABETA 2007
- [5] Khairudin. Sosiologi Keluarga, Yogyakarta. 1985.
- [6] Nur Cahaya. Harian SUARA MERDEKA, 9 Agustus 2008
- [7] Suharto, 2008, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia,
- [8] Suharsimi Arikunto 1993, Metodologi Penelitian : PT Rineka Cipta Jakarta, 1998
- [9] Sinar Jaminan Sosial PUSPENSOS DEPSOS, 2010
<http://www.scribd.com/doc/50205166/Analisis-Program-Keluarga-Harapan>
- [10] <http://www.depsos.go.id>
- [11] Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- [12] Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- [13] Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan".
- [14] Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008".
- [15] Dra. Teti Ati Padmi, Drs. Anwar Sitepu , MPM, Drs. Muchtar, M.Si, Muhammad BELANAWANE S, Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si, Nyi. R. Irmayani, SH, M.Si PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI INDONESIA: Dampak Pada Rumah Tangga

- Sangat Miskin di Tujuh Provinsi. <http://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/47/program-keluarga-harapan-di-indonesia-dampak-pada-rumah-tangga-sangat-miskin-di-tujuh-provinsi#sthash.hbUnhuJW.dpuf>, Januari 2012
- [16] Eny Sulistyaningrum, M.A., Ph.D. *_Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Tahun 2016*. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&perpus_id=&perpus=1&searchstring=%20PKH&self=1&op=review Universitas Gajah Mada 2016
- [17] IRENTY HELENA; Dr. A.G. Subarsono, MA *Dampak pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pembagian kerja rumah tangga (studi kasus : Penelitian Dilakukan digedong tengen Yogyakarta)*. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&perpus_id=&perpus=1&searchstring=%20PKH&self=1&op=review Universitas Gajah Mada 2016
- [18] SANUSI, Anuar; WIBASURI, Anggalia. *Model Pemberdayaan Tata Kelola Kelompok Usaha Kecil Menengah Pengrajin Batu Permata Bungur Lampung Selatan*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis Pengabdian Masyarakat Darmajaya*, 2015, 1.1: 96-123.